

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan hubungan internasional kontemporer menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam praktik kebijakan luar negeri. Pada era yang modern ini, ruang gerak bagi aktor non-negara dan sub-negara semakin meluas, sehingga memungkinkan mereka untuk berperan secara lebih signifikan dan mandiri dalam dinamika hubungan internasional (Rachmawati, 2021). Sejalan dengan perkembangan tersebut, aktor subnasional tidak lagi terbatas pada peran domestik, melainkan mulai memanfaatkan berbagai instrumen diplomatik. Sebagai contohnya, kerjasama antara provinsi dengan provinsi lain di luar negeri (sister province) serta pengembangan kemitraan antarkota dengan tujuan pemenuhan kepentingan.

Keterlibatan aktor sub-negara bukan hanya sebagai pelengkap melainkan suatu bukti perluasan pintu diplomatik yang kini tidak hanya berasal dari satu pintu sehingga membentuk lanskap diplomasi global yang semakin kompleks dan berlapis (Jönsson, 2018). Aktor sub-negara turut memengaruhi dinamika hubungan luar negeri tradisional melalui peran mereka sebagai entitas independen atau semi-independen yang berpartisipasi dalam aktivitas diplomasi internasional, baik bersama pemerintah nasional maupun secara terpisah. Keterlibatan ini tercermin dalam praktik paradiplomasi, di mana aktor sub-negara membangun interaksi internasional sendiri guna memperjuangkan kepentingan regional atau lokal dalam

konteks global (Fadillah Wiyototsani et al., 2024). Fenomena tersebut dapat berkontribusi dalam memperluas cakupan kebijakan luar negeri suatu negara, misalnya melalui inisiatif di bidang ekonomi, budaya, maupun politik. Di sisi lain, meningkatnya aktivitas internasional aktor sub-nasional juga mengharapant adanya pengelolaan dan koordinasi yang lebih efektif dengan pemerintah pusat agar konsistensi dan keselarasan diplomasi nasional tetap terjaga (Ali, 2025).

Sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bersifat bebas dan aktif, Indonesia tidak berpihak pada kekuatan atau blok tertentu.. Orientasi kebijakan luar negeri Indonesia pada masa kini tidak lagi dipahami secara pasif. Sebaliknya, kebijakan tersebut menunjukkan karakter yang semakin aktif dan *outward-looking* dalam merespons dinamika global yang terus berkembang (Institute of International Studies, 2025). Pendekatan ini tercermin dari keberanian Indonesia dalam mengambil inisiatif serta menjajaki arah dan bentuk kerja sama baru di tingkat regional maupun internasional, tanpa mengabaikan kepentingan nasional. Dengan demikian, kebijakan luar negeri Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai instrumen menjaga kemandirian politik, tetapi juga sebagai sarana strategis untuk memperluas peran dan kontribusi Indonesia dalam tatanan internasional.

Dalam kerangka kebijakan luar negeri Indonesia yang bersifat bebas dan aktif, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan kebijakan luar negeri di tingkat subnasional. Pemerintah daerah diberikan ruang untuk menjalin kerja sama luar negeri sebagai bagian dari upaya memperkuat kepentingan nasional sekaligus mendorong pembangunan daerah (Alamsyah et al., 2025). Keterlibatan ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia tidak

hanya dijalankan oleh pemerintah pusat, tetapi juga diimplementasikan melalui berbagai aktor pemerintahan di tingkat daerah. Keterlibatan ini seringkali diasosiasikan dengan istilah Paradiplomasi.

Meskipun instrumen paradiplomasi memberikan panggung artikulasi bagi entitas subnasional untuk merespons globalisasi, dalam sistem tata kelola negara kesatuan yang sentralistik secara urusan hubungan luar negeri seperti Republik Indonesia, praktik ini tidak dapat beroperasi dalam ruang otonomi yang absolut. Fenomena keterlibatan internasional oleh pemerintah daerah di Indonesia lebih tepat dikonseptualisasikan melalui paradigma *Orchestrated Paradiplomacy* (paradiplomasi yang terorkestrasi) (Riyanto et al., 2025). Konsepsi ini secara teoretis menegaskan bahwa pemerintah pusat tetap memegang kendali strategis sebagai "orkestrator" arsitektur diplomasi nasional, sementara pemerintah daerah difungsikan sebagai agen atau perpanjangan tangan yang menjalankan mandat nasional ke dalam implementasi teknis dan spasial di daerah (Bergeijk & Moons, 2007).

Validitas dari konsep orkestrasi ini memanifestasi secara sempurna dalam rekam jejak kerja sama lintas negara antara Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Fujian, Tiongkok. Hubungan bilateral subnasional ini memiliki arsitektur hukum yang sangat kompleks dan berjenjang, yang secara gamblang membuktikan adanya perpaduan antara inisiasi lokal dan intervensi orkestrasi dari pemerintah pusat. Kemitraan ini bermula murni dari payung hukum otonom di tingkat daerah, yang diresmikan melalui penandatanganan *Memorandum of Understanding on the Establishment of Sister Province Relationship between Central Java and Fujian*

pada tanggal 12 Juni 2003 (Susiatiningsih, 2014). Kesepakatan ini terus dirawat dan diperbarui, salah satunya melalui Perjanjian tentang Pembentukan Komite Bersama untuk Kerjasama dan Pembangunan pada periode 2012-2018 (Waluyo, 2021).

Dalam model tata kelola berlapis (Multi-Level Governance) ini, setiap manuver internasional di tingkat daerah diwajibkan untuk beresonansi dengan kebijakan politik luar negeri "Bebas Aktif" dan harus melalui mekanisme harmonisasi, verifikasi, dan perizinan yang ketat dari kementerian terkait. Kerja sama antara Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Fujian dapat diidentifikasi setidaknya memiliki tiga karakteristik yang menjadikannya berbeda dibandingkan dengan kerja sama serupa yang dilakukan oleh provinsi lain.

Pertama, kerja sama antara Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Fujian tidak terlepas dari adanya ikatan historis yang telah terbangun secara natural dalam rentang waktu yang panjang. Ikatan ini berakar pada peran Jawa Tengah sebagai salah satu episentrum pendaratan, persinggahan, serta permukiman permanen bagi para imigran dari Tiongkok daratan, yang secara demografis didominasi oleh etnis Hokkien yang berasal dari wilayah pesisir Provinsi Fujian (Falabiba, 2019). Interaksi awal yang bersifat sporadis tersebut kemudian berkembang menjadi hubungan sosial yang lebih kompleks dan berkelanjutan, menciptakan fondasi awal bagi terbentuknya relasi antarmasyarakat kedua wilayah.

Seiring berjalannya waktu, interaksi tersebut mengalami proses institusionalisasi kultural yang semakin kuat, terutama sejak kedatangan armada maritim yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho (Zheng He) pada awal abad ke-15 (Handayani, 2012). Jejak historis ini tidak hanya memperkuat hubungan

perdagangan, tetapi juga melahirkan simbol-simbol kolektif yang merepresentasikan asimilasi budaya, seperti keberadaan Klenteng Sam Poo Kong di Kota Semarang. Selain itu, kota-kota pesisir di Jawa Tengah, seperti Semarang, Demak, Jepara, dan Lasem, berkembang menjadi pusat perniagaan sekaligus ruang interaksi budaya yang intens. Dengan demikian, keterhubungan historis dan sosial-budaya tersebut, meskipun pada awalnya tidak terlembagakan secara formal, secara signifikan memperkuat dimensi *people-to-people contact* yang kemudian menjadi fondasi sosial bagi keberlanjutan kerja sama antara kedua provinsi (Wanzhen, 2023).

Selain itu, pola kerja sama yang terjalin juga terintegrasi secara langsung dengan agenda strategis pada level nasional maupun global, seperti Belt and Road Initiative (BRI) dari Tiongkok serta visi Poros Maritim Dunia Indonesia (Waluyo, 2021). Keterkaitan ini menunjukkan bahwa kerja sama Jawa Tengah tidak berdiri sebagai hubungan antardaerah yang bersifat simbolik, melainkan berada dalam kerangka yang lebih luas dan terhubung dengan kepentingan pembangunan strategis kedua negara dan Jawa Tengah tampak memiliki posisi yang lebih strategis karena bersinggungan langsung dengan proyek prioritas bilateral.

Sejalan dengan hal tersebut, peran pemerintah daerah sebagai aktor diplomasi subnasional didukung oleh kerangka hukum yang berlaku, yang memberikan dasar legal bagi keterlibatan daerah dalam kerja sama internasional. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang hingga saat ini masih berlaku dengan beberapa perubahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (JDIH

BPK, 2015; UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 23 TAHUN 2014, 2014). Regulasi tersebut memberikan landasan normatif bagi daerah untuk menjalin kerja sama luar negeri, namun dalam batasan kewenangan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat.

Keterlibatan pemerintah daerah dalam kerja sama luar negeri menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri nasional tidak hanya berhenti pada perumusan di tingkat pusat, tetapi juga dijalankan dan diterjemahkan di tingkat daerah. Proses penerjemahan tersebut tidak selalu bersifat seragam, mengingat pemerintah daerah memiliki kepentingan, kapasitas, dan konteks pembangunan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan luar negeri di tingkat subnasional memerlukan penyesuaian tertentu agar tetap sejalan dengan arah kebijakan nasional sekaligus relevan dengan kebutuhan daerah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penting untuk memahami bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia diadaptasi oleh pemerintah daerah dalam praktik kerja sama internasional. Kajian mengenai proses paradiplomasi dilaksanakan di tingkat daerah menjadi relevan untuk melihat dinamika hubungan antara kebijakan luar negeri nasional dan implementasinya di tingkat subnasional. Dengan demikian, kajian mengenai paradiplomasi te luar negeri di tingkat pemerintah daerah menjadi relevan untuk dianalisis secara lebih mendalam guna memahami bagaimana aktor sub-nasional menerjemahkan dan mendukung kebijakan luar negeri Indonesia dalam praktik kerja sama internasional.

Keterlibatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam kerja sama Sister Province dengan Provinsi Fujian menunjukkan bahwa dinamika kerja sama

internasional di tingkat subnasional tidak hanya terwujud dalam bentuk implementasi program, tetapi juga berimplikasi pada penyesuaian kebijakan di tingkat daerah. Hal ini menandakan bahwa aktivitas kerja sama luar negeri oleh pemerintah daerah tidak bersifat administratif semata, melainkan turut memengaruhi arah dan substansi kebijakan pembangunan daerah.

Sebagai contoh konkret, pada fase awal praktik paradiplomasi arsitektur hukum di Provinsi Jawa Tengah bertumpu pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pihak Luar Negeri. Regulasi ini berfungsi sebagai kerangka dasar yang mengatur tahapan prosedural kerja sama, mulai dari inisiasi, penjajakan, negosiasi, hingga penandatanganan nota kesepahaman. Dalam konteks awal, ketika interaksi antara Jawa Tengah dan Fujian masih terbatas pada diplomasi budaya, pertukaran pelajar, serta kunjungan kehormatan, keberadaan Pergub tersebut dinilai telah memadai untuk mengakomodasi kebutuhan kerja sama.

Namun, dinamika kerja sama mengalami perkembangan yang signifikan pada periode berikutnya, terutama ketika hubungan antara Jawa Tengah dan Fujian mulai bertransformasi ke arah kerja sama ekonomi yang lebih kompleks. Hal ini ditandai dengan integrasi rantai pasok maritim serta pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang dalam skema kerja sama Two Countries Twin Parks (TCTP). Perubahan skala dan karakter kerja sama tersebut menuntut adanya penyesuaian kebijakan yang lebih adaptif guna menjawab kebutuhan teknis dan operasional di lapangan (FUJIAN FOREIGN AFFAIRS, 2023).

Sebagai respons terhadap dinamika tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan penyesuaian dalam berbagai instrumen kebijakan, khususnya pada dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah. Dalam sistem birokrasi Indonesia, setiap program yang difasilitasi oleh pemerintah daerah harus terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan diturunkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan (RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023, 2019).

Sejalan dengan komitmen kerja sama dengan Fujian, pemerintah provinsi secara berkala menetapkan Peraturan Gubernur terkait RKPD, seperti Pergub Nomor 21 Tahun 2024 yang diperbaharui dengan Pergub Nomor 19 Tahun 2025 (PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 21 TAHUN 2024, 2024; PERATURAN GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 19 TAHUN 2025, 2025). Melalui regulasi ini, dilakukan penyesuaian nomenklatur program, penyediaan alokasi anggaran untuk fasilitasi kerja sama luar negeri, pembiayaan kegiatan delegasi, promosi investasi, serta dukungan terhadap pengembangan infrastruktur dasar dalam kerangka kerja sama kawasan kembar.

Penyesuaian kebijakan juga terlihat pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui penguatan Rencana Strategis perangkat daerah. Hal ini dilegitimasi melalui Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2019 yang mengatur arah kebijakan strategis masing-masing instansi teknis. Melalui mekanisme ini, perangkat daerah seperti Dinas Kelautan dan Perikanan didorong untuk merumuskan program operasional yang selaras dengan agenda kerja sama internasional. Program-program seperti transfer teknologi budidaya,

pengembangan pengolahan pasca-panen, hingga inovasi teknologi maritim menjadi bagian dari agenda yang diintegrasikan ke dalam perencanaan kerja dinas.

Selain pada aspek administratif dan programatik, penyesuaian kebijakan juga terjadi dalam ranah tata ruang dan pengembangan wilayah. Transformasi Kawasan Industri Terpadu Batang menjadi bagian dari ekosistem kerja sama internasional mendorong adanya penyesuaian kebijakan spasial. Hal ini ditandai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Industropolis Batang, yang kemudian diikuti dengan penyesuaian regulasi di tingkat daerah, termasuk revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Batang.

Selain penyesuaian dalam dokumen perencanaan dan tata ruang, dinamika kerja sama Sister Province antara Provinsi Jawa Tengah dan Fujian juga mendorong perubahan yang lebih luas dalam arsitektur kebijakan daerah. Hal ini tercermin dari munculnya berbagai regulasi baru yang secara langsung mengakomodasi kebutuhan operasional kerja sama internasional, termasuk dalam aspek kelembagaan, perizinan, dan pengelolaan dampak pembangunan.

Salah satu bentuk perubahan tersebut adalah diterbitkannya Peraturan Gubernur Nomor 51B Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah, yang menggantikan regulasi sebelumnya yang dinilai tidak lagi relevan dengan kompleksitas kerja sama internasional saat ini. Regulasi ini memberikan kerangka operasional yang lebih komprehensif bagi pemerintah daerah dalam mengelola kerja sama lintas negara (PERGUB JAWA TENGAH NOMOR 26 TAHUN 2025, 2025).

Selain itu, dalam rangka mendukung pengembangan kawasan industri yang terintegrasi dalam skema Two Countries Twin Parks (TCTP), pemerintah daerah juga melakukan penyesuaian pada aspek perizinan melalui Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan integrasi layanan perizinan, khususnya dalam mendukung arus investasi yang masuk ke Kawasan Ekonomi Khusus Industropolis Batang (PERGUB JAWA TENGAH NOMOR 26 TAHUN 2025, 2025).

Lebih lanjut, sebagai respons terhadap potensi dampak lingkungan dari aktivitas industri dalam skala besar, pemerintah daerah juga menginisiasi kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan, salah satunya melalui Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2025 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Industri Hijau. Kebijakan ini menunjukkan adanya upaya untuk mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam implementasi kerja sama internasional di tingkat daerah (PERGUB JAWA TENGAH NOMOR 26 TAHUN 2025, 2025).

Serangkaian penyesuaian kebijakan tersebut menunjukkan bahwa kerja sama Sister Province tidak hanya berdampak pada implementasi program, tetapi juga mendorong transformasi dalam kerangka kebijakan daerah. Dalam konteks ini, kebijakan luar negeri Indonesia yang berlandaskan prinsip bebas aktif mengalami proses penerjemahan ke dalam kebijakan daerah melalui berbagai instrumen regulasi dan perencanaan. Proses ini mencerminkan adanya mekanisme translasi kebijakan (policy translation), di mana pemerintah daerah berperan dalam

menyesuaikan dan mengintegrasikan arahan kebijakan nasional ke dalam konteks pembangunan daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjalankan perannya dalam kerja sama Sister Province Jawa Tengah Fujian di bawah kerangka Orchestrated Paradiplomacy?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan kerja sama Sister Province dengan Provinsi Fujian di bawah kerangka Orchestrated Paradiplomacy.

Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi mekanisme koordinasi dan fasilitasi yang dijalankan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam kerja sama Sister Province dengan Fujian.
2. Menganalisis pola relasi vertikal antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri dalam konteks kerja sama luar negeri daerah.
3. Mengkaji posisi dan peran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai dalam sistem tata kelola Orchestrated Paradiplomacy.

I.4 Kegunaan Penelitian

Dalam merespons dinamika hubungan internasional yang semakin kompleks, khususnya terkait dengan keterlibatan aktor sub-nasional dalam praktik kebijakan luar negeri, penelitian ini tidak hanya ditujukan untuk mengisi kekosongan kajian akademik, tetapi juga untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi kebijakan luar negeri Indonesia di tingkat daerah. Oleh karena itu, penting untuk menjelaskan kegunaan penelitian ini secara terpisah, baik dari sisi praktis maupun dari sisi teoretis, guna menunjukkan kontribusi penelitian terhadap praktik pemerintahan dan pengembangan kajian hubungan internasional.

1.4.1 Kegunaan Praktis

Secara praktis, Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai mekanisme operasional paradiplomasi di Indonesia, khususnya cara kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengelola kerja sama luar negeri dalam koridor regulasi nasional. Temuan ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah lain yang hendak menyelenggarakan kerja sama serupa, serta bagi pemerintah pusat dalam mengevaluasi efektivitas mekanisme pengawasan kerja sama luar negeri daerah.

Gambaran tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dan referensi awal bagi pemerintah daerah dalam memahami praktik kerja sama luar negeri daerah yang dijalankan dalam kerangka kebijakan nasional. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi pihak-pihak terkait, baik di tingkat daerah maupun pusat, mengenai dinamika pelaksanaan kebijakan luar negeri di

tingkat sub-nasional, khususnya dalam konteks hubungan dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

1.4.2 Kegunaan Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hubungan internasional, khususnya dalam studi kebijakan luar negeri dan peran aktor sub-nasional. Penelitian ini memperkaya diskursus akademik mengenai Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian paradiplomasi, khususnya pada konsep Orchestrated Paradiplomacy, dengan menyajikan bukti empiris dari perspektif praktik birokrasi pemerintah daerah. Penelitian ini memperluas pemahaman yang ada dalam literatur dari level analisis tata kelola nasional ke level mekanisme administrasi daerah mengenai dimensi yang belum banyak dieksplorasi dalam penelitian sebelumnya. Lebih lanjut, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas hubungan pusat dan daerah, kerja sama luar negeri daerah, serta dinamika aktor sub-nasional dalam kebijakan luar negeri, terutama dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia.

1.5 Kerangka pemikiran Teoritis

1.5.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian sebelumnya (Riyanto et al., 2025) telah menjelaskan TCTP sebagai bentuk Orchestrated Paradiplomacy pada level tata kelola nasional. Namun penelitian tersebut belum menguraikan bagaimana mekanisme orkestrasi tersebut diterjemahkan ke dalam praktik administrasi pemerintah daerah. Penelitian ini

menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak membentuk kebijakan daerah yang spesifik untuk kerja sama Sister Province dengan Fujian, melainkan menjalankan fungsi koordinatif, fasilitatif, dan administratif dalam kerangka kebijakan nasional. Dengan demikian, penelitian ini memperluas pemahaman mengenai Orchestrated Paradiplomacy dari perspektif praktik birokrasi pemerintah daerah.

Penelitian yang membahas peran pemerintah daerah dalam kerja sama luar negeri umumnya ditempatkan dalam kerangka paradiplomasi. Waluyo (2021) dalam penelitiannya mengenai kerja sama *Sister Province* antara Jawa Tengah dan Fujian menekankan bahwa kerja sama tersebut merupakan bagian dari strategi paradiplomasi pemerintah daerah untuk mendorong kepentingan ekonomi dan pembangunan regional. Penelitian ini menunjukkan bahwa kerja sama Jawa Tengah dan Fujian telah menghasilkan berbagai bentuk interaksi, khususnya di bidang perdagangan, investasi, dan pertukaran budaya. Namun, kajian ini lebih menitikberatkan pada bentuk dan capaian kerja sama, tanpa membahas secara mendalam bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia dipahami dan diterjemahkan oleh pemerintah daerah dalam proses pelaksanaannya.

Penelitian lain oleh Dila et al., (2022) mengkaji efektivitas kerja sama *Sister Province* antara Jawa Tengah dan Queensland melalui program *International Technical Assistance Cooperation* (ITAC). Penelitian ini menggunakan pendekatan efektivitas kebijakan dengan indikator kejelasan tujuan, koordinasi antarlembaga, serta mekanisme evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama tersebut belum berjalan optimal akibat lemahnya koordinasi internal dan keterbatasan

kapasitas kelembagaan pemerintah daerah. Meskipun demikian, penelitian ini masih memandang kebijakan luar negeri sebagai kerangka yang bersifat statis dan tidak mengulas bagaimana kebijakan tersebut diadaptasi sesuai dengan kepentingan dan konteks daerah.

Sementara itu, penelitian (Aisyah & Deniar, 2025) mengenai kerja sama Yogyakarta dengan Gangwon-do menempatkan paradiplomasi sebagai instrumen strategis pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor pariwisata dan pendidikan. Penelitian ini menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki ruang untuk berperan aktif dalam hubungan internasional, meskipun tetap berada dalam kerangka kebijakan luar negeri nasional. Namun, fokus penelitian ini lebih diarahkan pada praktik kerja sama dan manfaat yang dihasilkan, sehingga belum menggali proses penafsiran dan penyesuaian kebijakan luar negeri nasional oleh pemerintah daerah.

Penelitian Khusniyah & Nuraeni, (2019) berfokus pada efektivitas implementasi kerja sama dalam konteks perang dagang global, maka penelitian ini berfokus pada proses praktik paradiplomasi yang terorkestrasi luar negeri Indonesia oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam kerja sama sister province dengan Fujian. Dengan demikian, titik berat penelitian ini bukan pada capaian output atau neraca perdagangan, melainkan pada bagaimana kebijakan luar negeri nasional ditafsirkan, disesuaikan, dan dijalankan oleh aktor subnasional.

Kedua, dari sisi kerangka teori, penelitian sebelumnya menggunakan teori efektivitas, sedangkan penelitian ini menggunakan Teori Paradiplomasi yang terorkestrasi sebagai landasan utama, dengan konsep turunan berupa Policy

Adaptation dan Subnational Actors, serta diperkuat oleh perspektif Multi-Level Governance yang menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor dalam sistem tata kelola bertingkat antara level nasional dan internasional. Dengan kerangka ini, penelitian tidak hanya melihat hasil kerja sama, tetapi juga menganalisis dinamika hubungan pusat–daerah serta ruang manuver pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan luar negeri.

Penelitian yang dilakukan oleh Darmayadi & Putri, (2022) berjudul “Paradiplomasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Melalui Sister Province dengan Republik Bashkortostan Rusia” mengkaji strategi paradiplomasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam membangun kerja sama sister province dengan Republik Bashkortostan, Rusia. Dalam kerangka teoretisnya, penelitian ini merujuk pada konsep paradiplomasi sebagai bagian dari desentralisasi kebijakan luar negeri, di mana aktor subnasional memperoleh ruang untuk melakukan interaksi internasional seiring dinamika globalisasi. Paradiplomasi dipahami sebagai fenomena yang dapat menjadi aset pembangunan daerah, namun juga berpotensi menimbulkan ketegangan dengan pemerintah pusat apabila tidak dikelola secara tepat.

Sementara itu, penelitian ini menggunakan Teori Paradiplomasi secara lebih konseptual, dengan konsep turunan berupa Policy Adaptation dan Subnational Actors, serta diperkuat oleh perspektif Multi-Level Governance yang menempatkan aktor subnasional dalam struktur tata kelola bertingkat antara level nasional dan internasional. Dalam kerangka ini, pemerintah daerah tidak hanya dipahami sebagai pelaksana kerja sama, tetapi sebagai aktor yang bernegosiasi dan beradaptasi dalam struktur kebijakan luar negeri yang lebih luas.

Berdasarkan penelaahan terhadap berbagai penelitian terdahulu, terdapat sejumlah celah penelitian yang menunjukkan keterbatasan kajian dalam membahas kerja sama sister province. Sebagian besar studi sebelumnya cenderung menitikberatkan pada aspek efektivitas program, tingkat keberhasilan kerja sama, serta hambatan teknis dalam implementasi, tanpa memberikan perhatian yang memadai terhadap bagaimana kebijakan luar negeri diadaptasi dan diterjemahkan di tingkat daerah. Selain itu, kajian mengenai peran pemerintah daerah dalam menafsirkan prinsip-prinsip politik luar negeri Indonesia; seperti bebas aktif dan kepentingan nasional, serta menyesuaikannya dengan kebutuhan, kepentingan, dan kapasitas daerah masing-masing masih relatif minim. Dalam konteks ini, paradiplomasi lebih sering diposisikan sebagai sekadar praktik kerja sama atau aktivitas internasional daerah, bukan sebagai bagian dari proses kebijakan yang mencerminkan dinamika hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Lebih jauh, perbedaan kapasitas institusional, ketersediaan sumber daya, serta posisi tawar antaraktor dalam kerja sama lintas wilayah, misalnya antara provinsi di Indonesia dan mitra di luar negeri, belum banyak dianalisis secara mendalam sebagai faktor yang memengaruhi proses praktik paradiplomasi yang terorkestrasi luar negeri.

Berangkat dari celah penelitian tersebut, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mengulang kajian-kajian sebelumnya, melainkan menawarkan kontribusi kebaruan dengan menempatkan fokus pada proses praktik paradiplomasi yang terorkestrasi luar negeri Indonesia oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini memandang kerja sama sister province antara Jawa Tengah dan Fujian tidak semata sebagai bentuk kerja sama internasional daerah, tetapi sebagai

arena penerjemahan dan penyesuaian kebijakan luar negeri nasional di tingkat subnasional. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya menghadirkan temuan empiris mengenai dinamika aktor serta perbedaan kapasitas yang muncul dalam proses kerja sama, yang dianalisis sebagai hasil dari interaksi kebijakan dan institusional, bukan sekadar asumsi normatif atau variabel awal penelitian.

1.5.2 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menempatkan Paradiplomasi sebagai teori utama dalam menganalisis kerja sama Sister Province antara Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Fujian. Secara konseptual, paradiplomasi merujuk pada keterlibatan langsung maupun tidak langsung pemerintah non-pusat dalam arena hubungan internasional melalui interaksi formal maupun informal dengan entitas asing. Konsep ini pertama kali berkembang dalam diskursus akademik pada dekade 1980-an dan digunakan untuk menjelaskan aktivitas internasional pemerintah subnasional di berbagai negara (Duchacek, 1987). Ivo Duchacek dianggap sebagai salah satu pemikir utama yang mencetuskan konsep paradiplomasi, dengan ditulisnya secara ekstensif tentang peran pemerintah daerah dalam hubungan internasional, terutama dalam bukunya *The Territorial Dimension of Politics* (1986).

Meskipun penelitian ini tidak membahas ataupun menganalisa menggunakan asas desentralisasi, namun dalam konteks Indonesia, kemunculan paradiplomasi tidak dapat dilepaskan dari transformasi negara melalui kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi (Utomo, 2022). Proses desentralisasi membuka ruang bagi artikulasi kepentingan lokal dalam sistem internasional, meskipun kebijakan politik luar negeri tetap menjadi domain konstitusional pemerintah pusat

(Umar, 2021). Dengan demikian, aktivitas kerja sama luar negeri oleh pemerintah daerah bukanlah penyimpangan dari sistem negara kesatuan, melainkan konsekuensi dari restrukturisasi tata kelola kekuasaan pasca-desentralisasi (Mendes & Figueira, 2017).

Paradiplomasi dalam penelitian ini tidak dipahami sekadar sebagai aktivitas promosi ekonomi daerah, tetapi sebagai bentuk diplomasi lapis kedua yang terinstitusionalisasi (Abo Elassal & Jabareen, 2025; Ebi et al., 2021). Aktivitas lintas batas yang dilakukan aktor subnasional telah berevolusi menjadi instrumen strategis untuk merespons kompleksitas isu global yang berdampak langsung pada tingkat lokal (Utomo, 2022). Oleh karena itu, kerja sama Sister Province Jawa Tengah dengan Fujian dianalisis sebagai bagian dari dinamika hubungan internasional yang dijalankan oleh aktor daerah dalam kerangka negara kesatuan Indonesia.

Sebagai turunan langsung dari teori paradiplomasi, penelitian ini menggunakan konsep Policy Adaptation untuk menjelaskan bagaimana kebijakan luar negeri nasional diterjemahkan di tingkat provinsi. Konsep praktik paradiplomasi yang terorkestrasi menyediakan instrumen analitis untuk memahami bagaimana aktor di tingkat meso merespons, merekayasa, dan melokalisasi kebijakan makro yang dirumuskan di tingkat pusat (Roza Rizky et al., 2025). Praktik paradiplomasi yang terorkestrasi bukanlah proses eksekusi administratif semata, melainkan melibatkan pembelajaran kebijakan, transfer kebijakan, serta penciptaan lingkungan kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan lokal (Roza Rizky et al., 2025).

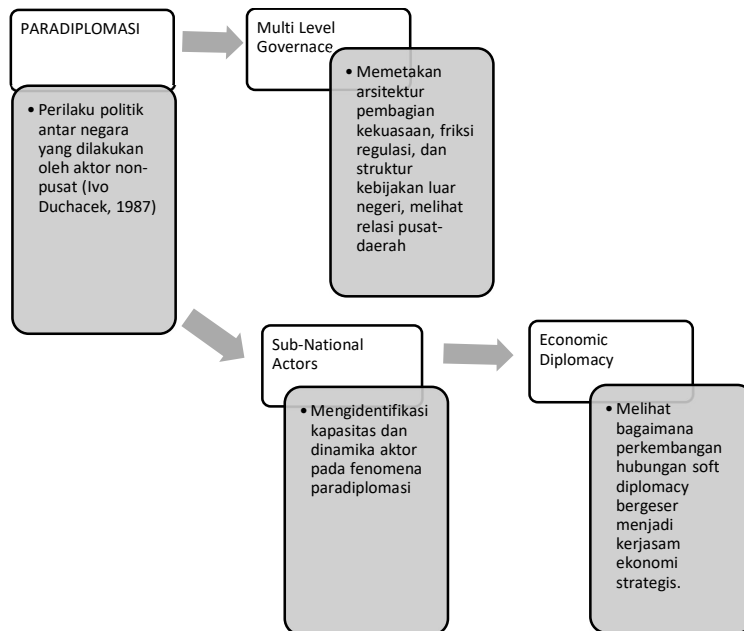
Konsep turunan kedua adalah Sub-National Actor, yang digunakan untuk mengidentifikasi tipologi, kapasitas agensi, dan dinamika aktor yang terlibat dalam sebuah fenomena paradiplomasi (Ali, 2025). Dari sudut pandang paradiplomasi, pandangan Duchacek mengakui bahwa aktor sub nasional semakin memainkan peran yang penting dalam hubungan internasional. Berbanding terbalik dengan pandangan state-sentris yang memandang negara sebagai entitas monolitik, dan sebaliknya melihat negara sebagai jejaring institusi dengan konfigurasi aktor yang hierarkis dan kompleks. Keberadaan dan peran ini membuat batas-batas nasional menjadi "*meshlike*," menandakan bahwa kekuasaan dan pengaruh tidak lagi terpusat di tingkat nasional saja, melainkan tersebar di berbagai aktor sub nasional (Duchacek, 1987).

Dalam konteks Jawa Tengah, konfigurasi aktor paradiplomasi meliputi gubernur sebagai pemegang preferensi kebijakan makro, birokrasi administratif sebagai pengelola tata kelola kerja sama, serta aktor operasional teknis sebagai pelaksana di lapangan (Noormansyah et al., 2024). Hal ini menegaskan bahwa aktor subnasional memiliki kapasitas politis tertentu dalam memengaruhi arah implementasi kebijakan luar negeri di tingkat daerah.

Analisis terhadap aktor subnasional tersebut kemudian dibingkai dalam kerangka Multi-Level Governance (MLG). Konsep MLG digunakan untuk memetakan arsitektur pembagian kekuasaan, friksi regulasi, serta struktur kebijakan luar negeri antara pemerintah pusat dan entitas daerah (Christie, 2022). Diperkenalkan pertama kali oleh Gary Marks dan Liesbet Hooghe (2004) dalam studi integrasi Uni Eropa, teori MLG mendekonstruksi asumsi tradisional bahwa

negara adalah kesatuan monolitik dengan satu pusat komando (pusat hierarkis) (Amytia et al., 2026) yang mengamini sudut pandang teori *Sub-national Actors* sebelumnya.

Dengan demikian, posisi aktor subnasional tidak dapat dilepaskan dari struktur tata kelola multilevel yang mengatur batas kewenangan dan mekanisme persetujuan kerja sama luar negeri daerah. Relasi pusat–daerah ini membentuk ruang gerak sekaligus batas institusional bagi praktik paradiplomasi Jawa Tengah.



Gambar 1.1 Visualisasi Kerangka Pemikiran

Secara keseluruhan, kerangka pemikiran penelitian ini menempatkan Paradiplomasi sebagai teori utama yang menjelaskan keterlibatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hubungan internasional. Di bawahnya, Policy Adaptation menjelaskan proses penerjemahan kebijakan luar negeri nasional di

tingkat daerah, Sub-National Actor mengidentifikasi konfigurasi dan kapasitas aktor pelaksana, dan Multi-Level Governance membingkai relasi vertikal pusat–daerah yang menentukan ruang institusional paradiplomasi tersebut. Sintesis konseptual ini memungkinkan analisis yang sistematis terhadap dinamika implementasi kebijakan luar negeri Indonesia dalam kerja sama Sister Province Jawa Tengah dengan Fujian.

1.6 Operasionalisasi Konsep

Untuk mengarahkan penelitian ini secara terukur dan sistematis, maka konsep-konsep utama dalam penelitian perlu dioperasionalkan ke dalam indikator yang dapat diamati dan dianalisis. Operasionalisasi konsep ini berguna untuk memastikan bahwa setiap aspek dari rumusan masalah dan tujuan penelitian memiliki pijakan konseptual yang jelas, serta dapat ditelusuri melalui data yang relevan.

1.6.1 Definisi Konseptual

1.6.1.1 Tata Kelola Multilevel

Secara teoritis, istilah MLG pertama kali dikembangkan oleh Gary Marks untuk menjelaskan proses desentralisasi dan meningkatnya peran aktor subnasional dalam sistem supranasional seperti Uni Eropa. Dalam perkembangannya, MLG tidak lagi melihat negara sebagai aktor tunggal yang memonopoli proses kebijakan, melainkan sebagai bagian dari konfigurasi kekuasaan yang tersebar ke atas (supranasional), ke bawah (subnasional), dan ke samping (aktor non-negara) (Saito-Jensen, 2015).

Konsep Multi-Level Governance (MLG) dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan struktur relasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan kerja sama internasional. MLG dipahami sebagai kerangka tata kelola yang melibatkan interaksi dan pembagian kewenangan antara berbagai level pemerintahan (Saito-Jensen, 2015).

Meskipun secara normatif politik luar negeri merupakan kewenangan pemerintah pusat, desentralisasi di Indonesia membuka ruang bagi daerah untuk berinteraksi dalam ranah internasional dengan tetap berada dalam kerangka regulasi nasional (Umar, 2021; Utomo, 2022). Artinya, paradiplomasi berlangsung dalam struktur yang bersifat multilevel, di mana daerah tidak sepenuhnya otonom, tetapi juga tidak sepenuhnya pasif. Dengan demikian, MLG berfungsi sebagai struktur yang membingkai sekaligus membatasi ruang gerak aktor subnasional.

Dalam penelitian ini, Multi-Level Governance dipahami sebagai kerangka struktural yang mengatur interaksi vertikal antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan kerja sama Sister Province, termasuk dalam proses persetujuan, pengawasan, dan sinkronisasi kebijakan.

1.6.1.2 Aktor Subnasional

Konsep Sub-National Actors dalam penelitian ini merujuk pada aktor pemerintah non-pusat yang memiliki kapasitas agensi dalam interaksi internasional. Dimana negara tidak dipandang sebagai entitas tunggal dan monolitik, melainkan sebagai konfigurasi institusi yang kompleks dan hierarkis (Kuznetsov, 2014). Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki ruang untuk bertindak sebagai aktor dengan preferensi dan kepentingan tertentu.

Aktor subnasional juga memiliki kapasitas untuk membentuk preferensi kebijakan, membangun jaringan internasional, dan memengaruhi arah kerja sama lintas negara (Ali & Jasem, 2024). Dalam konteks Jawa Tengah, aktor tersebut meliputi gubernur sebagai pemegang arah kebijakan strategis, birokrasi administratif sebagai pengelola tata kelola kerja sama, serta dinas teknis sebagai pelaksana program di lapangan.

Lebih jauh, dinamika antar-aktor di tingkat daerah juga memperlihatkan adanya variasi kapasitas institusional dan kecenderungan pendekatan *top-down* dalam implementasi kerja sama (Noormansyah et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas paradiplomasi tidak hanya ditentukan oleh struktur formal, tetapi juga oleh kapasitas dan koordinasi antar-aktor subnasional itu sendiri. Bahkan, preferensi kepemimpinan individu dapat memengaruhi arah dan intensitas kerja sama internasional daerah (Roza Rizky et al., 2025).

Dengan demikian, Sub-National Actors dalam penelitian ini dipahami sebagai keseluruhan aktor daerah yang memiliki kapasitas, preferensi, dan peran strategis dalam menggerakkan paradiplomasi Jawa Tengah, khususnya dalam hubungan Sister Province dengan Fujian.

1.6.1.3 Diplomasi Ekonomi

Diplomasi ekonomi merupakan salah satu bentuk diplomasi yang memanfaatkan instrumen hubungan internasional untuk mencapai kepentingan ekonomi suatu negara. Dalam perkembangannya, konsep diplomasi ekonomi tidak lagi terbatas pada aktivitas perdagangan atau promosi ekspor, melainkan mencakup berbagai upaya untuk membuka akses pasar, memperkuat hubungan ekonomi

bilateral, memfasilitasi investasi, serta membangun jejaring ekonomi yang mendukung kepentingan nasional melalui kerja sama internasional (Chatterjee, 2020).

Van Bergeijk dan Moons menjelaskan bahwa diplomasi ekonomi memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan diplomasi komersial (*commercial diplomacy*). Diplomasi ekonomi tidak hanya berorientasi pada peningkatan aktivitas perdagangan dan investasi lintas negara, tetapi juga melibatkan pembangunan hubungan politik, ekonomi, dan sosial sebagai sarana untuk mendukung aktivitas ekonomi domestik. Selain itu, hubungan ekonomi bilateral juga dapat dimanfaatkan sebagai instrumen diplomasi dalam mencapai tujuan kebijakan luar negeri suatu negara (Bergeijk & Moons, 2007).

Perkembangan globalisasi, meningkatnya keterhubungan ekonomi antarnegara, serta terbentuknya rantai nilai global (*global value chains*) menyebabkan diplomasi ekonomi semakin melibatkan aktor di luar pemerintah pusat. Pemerintah daerah, institusi pendidikan, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya mulai berperan dalam membangun jejaring kerja sama ekonomi lintas negara sesuai dengan kewenangan dan kapasitas masing-masing. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa diplomasi ekonomi berkembang menjadi proses kolaboratif yang melibatkan berbagai aktor dalam sistem tata kelola multilevel (Bergeijk & Moons, 2007).

Dalam konteks penelitian ini, diplomasi ekonomi dipahami sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mendukung tujuan ekonomi melalui hubungan internasional, khususnya melalui penguatan kerja sama bilateral, fasilitasi investasi,

koordinasi antaraktor, serta pembangunan jejaring ekonomi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Fujian. Penggunaan konsep ini tidak dimaksudkan untuk menilai keberhasilan investasi maupun pertumbuhan ekonomi sebagai hasil langsung dari kerja sama tersebut, melainkan untuk memahami bagaimana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjalankan fungsi koordinatif dan fasilitatif dalam mendukung agenda kerja sama ekonomi yang berada dalam koridor kebijakan luar negeri nasional.

1.6.2 Definisi Operasional

Setelah menjelaskan kerangka konseptual yang melandasi penelitian ini pada bagian sebelumnya, diperlukan penjabaran lebih lanjut mengenai bagaimana konsep-konsep utama diterapkan secara konkret dalam analisis. Definisi operasional berikut menjelaskan bagaimana *Sub-National Actors*, *Multi-Level Governance*, dan *Economic Diplomacy* akan ditelusuri secara empiris dalam penelitian ini.

1.6.2.1 Tata Kelola Multilevel

Dalam studi hubungan internasional kontemporer, konsep tata kelola multilevel (multi-level governance/MLG) digunakan untuk menjelaskan bagaimana proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan tidak hanya berlangsung pada satu tingkat pemerintahan, melainkan melibatkan interaksi antara berbagai level, mulai dari supranasional, nasional, hingga subnasional (Saito-Jensen, 2015). Dalam konteks paradiplomasi, pendekatan ini menjadi relevan untuk memahami bagaimana aktor daerah beroperasi tidak secara terpisah, tetapi berada

dalam suatu struktur tata kelola yang saling terhubung dengan pemerintah pusat dan aktor internasional.

Dalam penelitian ini, tata kelola multilevel dipahami sebagai suatu kerangka operasional yang menjelaskan interaksi dan pembagian peran antar tingkat pemerintahan dalam pelaksanaan kerja sama internasional daerah, khususnya dalam skema Sister Province antara Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Fujian. Konsep ini tidak berdiri secara independen, melainkan beririsan dengan model *orchestrated paradiplomacy*, di mana pemerintah pusat tetap memegang kendali strategis, sementara pemerintah daerah berperan sebagai pelaksana sekaligus penghubung dalam implementasi kebijakan di tingkat lokal (Riyanto et al., 2025).

Secara operasional, tata kelola multilevel dalam penelitian ini dianalisis melalui tiga tingkatan utama. Pertama, pada tingkat makro (supranasional dan nasional), peran pemerintah pusat terlihat dalam perumusan kebijakan strategis dan kerangka regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan kerja sama. Dalam konteks ini, pemerintah pusat menetapkan kerangka regulasi dan persetujuan kerja sama luar negeri daerah (Morgan, 2025).

Kedua, pada tingkat meso (provinsi), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu aktor yang berperan dalam mengoordinasikan dan mengimplementasikan kebijakan tersebut di tingkat daerah (Arifin, 2024). Peran ini mencakup pengelolaan perizinan sektoral, sinkronisasi tata ruang, serta fasilitasi kerja sama ekonomi melalui kegiatan seperti promosi investasi dan *business matching*. Selain itu, pemerintah provinsi juga berfungsi sebagai penghubung

antara kepentingan nasional dan kebutuhan lokal, sekaligus menjaga stabilitas iklim investasi di daerah.

Ketiga, pada tingkat mikro (lokal/kabupaten), implementasi kebijakan dilakukan secara langsung oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten dan aktor pelaksana lainnya. Dalam penelitian ini, Pemerintah Kabupaten Batang bersama pengelola Kawasan Industri Terpadu Batang (Rochman, 2025) berperan dalam pelaksanaan teknis di lapangan, seperti penyediaan infrastruktur, pengelolaan tenaga kerja, serta operasionalisasi kegiatan industri yang menjadi bagian dari kerja sama internasional tersebut.

Meskipun demikian, interaksi antar level dalam tata kelola multilevel tidak selalu berjalan secara harmonis. Perbedaan kepentingan, kapasitas, dan beban tanggung jawab antar tingkat pemerintahan dapat menimbulkan dinamika koordinasi yang kompleks. Dalam konteks ini, pemerintah provinsi memiliki peran penting dalam menjembatani kepentingan antara pemerintah pusat yang berorientasi pada percepatan investasi dengan pemerintah daerah di tingkat lokal yang menghadapi langsung dampak sosial dan lingkungan dari implementasi kebijakan.

Lebih lanjut, penelitian ini juga mengidentifikasi bagaimana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjalankan fungsi administratif, koordinatif, dan fasilitatif dalam pelaksanaan kerja sama *Sister Province*. Fokus analisis tidak diarahkan pada keberhasilan investasi ataupun capaian ekonomi, melainkan pada bagaimana pemerintah provinsi melaksanakan perannya sebagai aktor subnasional dalam kerangka *orchestrated paradiplomacy*. Dengan demikian, konsep MLG digunakan

untuk menjelaskan proses hubungan antarpemerintahan yang membentuk pelaksanaan kerja sama internasional daerah, bukan untuk mengukur keberhasilan hasil ekonomi dari kerja sama tersebut (Riyanto et al., 2025).

I.6.2.2 Aktor Subnasional

Operasionalisasi *Sub-National Actors* dilakukan dengan memetakan membedah lanskap pelaku-pelaku di tingkat provinsi maupun yang bersinggungan dengan kerjasama *sister province* ini, karena pemerintah daerah bukanlah entitas yang monolitik melainkan sebuah jejaring institusi dengan preferensi dan kapasitas yang bervariasi. Operasionalisasi konsep ini diukur melalui tiga indikator utama yang menelisik dinamika internal birokrasi.

Indikator pertama adalah konfigurasi struktur kekuasaan. Analisis difokuskan pada peran Gubernur atau Penanggung jawab (Pj) Gubernur sebagai pemegang mandat politik yang menentukan arah geopolitik daerah, berhadapan dengan birokrasi administratif (Sekretariat Daerah/Biro Kerja Sama) yang bertugas menjaga kontinuitas program tanpa memandang suksesi kepemimpinan politik, serta Dinas Teknis (Disperindag, DKP, DPMPTSP) yang bertanggung jawab atas eksekusi di lapangan.

Indikator kedua mengukur kapasitas tawar (*bargaining power*) dan kapabilitas institusional. Hal ini menelisik sejauh mana literasi para birokrat daerah terkait regulasi internasional, ketersediaan anggaran APBD yang mandiri, serta kemampuan aparaturnya dalam merancang klausul kontrak internasional yang melindungi kepentingan Jawa Tengah dari potensi dominasi asimetris .

Indikator ketiga adalah pelibatan aktor semi-negara dan non-negara. Operasionalisasi ini memperluas cakupan subnasional dengan meneliti keterlibatan konsorsium BUMN/BUMD seperti PT Kawasan Industri Terpadu Batang sebagai aktor perantara yang mengeksekusi pembangunan infrastruktur, serta asosiasi bisnis lokal yang bertindak sebagai rantai pasok turunan bagi investasi Tiongkok (Riyanto et al., 2025).

I.6.2.3 Diplomasi Ekonomi

Dalam penelitian ini, konsep *economic diplomacy* dioperasionalkan sebagai bentuk aktivitas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam memfasilitasi pelaksanaan kerja sama ekonomi internasional melalui mekanisme koordinasi dan hubungan antarlembaga, tanpa dimaknai sebagai pembentukan kebijakan ekonomi baru di tingkat daerah. Operasionalisasi konsep ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjalankan fungsi administratif dan koordinatif dalam mendukung pelaksanaan kerja sama ekonomi dengan Provinsi Fujian yang berlangsung dalam koridor kebijakan luar negeri Indonesia. Berdasarkan definisi konseptual tersebut, diplomasi ekonomi dalam penelitian ini diidentifikasi melalui beberapa bentuk aktivitas.

Pertama, fasilitasi hubungan ekonomi bilateral yang diwujudkan melalui penyelenggaraan pertemuan, kunjungan resmi, forum bisnis, maupun aktivitas lain yang mempertemukan para pemangku kepentingan dari Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Fujian sebagai bagian dari pengembangan hubungan ekonomi bilateral (Bergeijk & Moons, 2007). Selain itu, diplomasi ekonomi juga tercermin dalam pelaksanaan koordinasi antarlembaga, yaitu peran Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah dalam menghubungkan pemerintah pusat, perangkat daerah, pelaku usaha, serta mitra luar negeri selama proses pelaksanaan kerja sama ekonomi internasional. Bentuk koordinasi tersebut menunjukkan fungsi pemerintah daerah sebagai koordinator administratif dalam kerangka *orchestrated paradiplomacy* (Bergeijk & Moons, 2007).

Selanjutnya, konsep diplomasi ekonomi dalam penelitian ini juga dioperasionalkan melalui aktivitas fasilitasi investasi dan kerja sama ekonomi. Aktivitas tersebut meliputi pemberian dukungan administratif, penyediaan informasi, pendampingan, serta peran sebagai penghubung (*facilitator*) bagi calon investor maupun mitra kerja sama, tanpa mengambil alih kewenangan pemerintah pusat dalam penetapan kebijakan luar negeri (Bergeijk & Moons, 2007). Di samping itu, pembangunan jejaring kerja sama juga menjadi bagian dari operasionalisasi konsep ini, yang ditunjukkan melalui mekanisme *Sister Province* sebagai salah satu wadah kelembagaan untuk membangun komunikasi, koordinasi, dan kerja sama ekonomi bilateral (Bergeijk & Moons, 2007).

Berdasarkan indikator-indikator tersebut, penelitian ini menganalisis diplomasi ekonomi dari perspektif peran yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai pelaksana fungsi administratif dalam kerja sama internasional. Oleh karena itu, penelitian ini tidak mengukur diplomasi ekonomi berdasarkan capaian ekonomi makro, seperti peningkatan nilai investasi, perdagangan, atau pertumbuhan ekonomi, melainkan berdasarkan bentuk-bentuk fasilitasi, koordinasi, dan pembangunan jejaring yang dilakukan oleh pemerintah

daerah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dalam mendukung pelaksanaan kerja sama ekonomi internasional.

1.7 Argumen Penelitian

Penelitian ini berargumen bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjalankan perannya dalam kerja sama Sister Province dengan Fujian secara mendasar sebagai agen administratif dalam kerangka Orchestrated Paradiplomacy, bukan sebagai aktor yang membentuk kebijakan luar negeri daerah yang otonom. Keterlibatan pemerintah daerah dalam kerja sama ini mencerminkan pelaksanaan mandat nasional melalui fungsi-fungsi koordinatif dan fasilitatif, dalam koridor regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Argumen ini dibangun di atas beberapa proposisi empiris. Pertama, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak menerbitkan regulasi daerah yang bersifat eksklusif untuk kerja sama dengan Fujian; seluruh kerja sama dijalankan berdasarkan regulasi nasional yang berlaku universal (UU No. 23/2014, PP No. 28/2018, Permendagri No. 25/2020). Kedua, narasumber kunci dari Biro KSLN secara eksplisit mengidentifikasi posisi pemerintah daerah sebagai fasilitator dan perpanjangan tangan pemerintah pusat dan bukan sebagai inisiator kebijakan mandiri. Ketiga, kerangka TCTP merupakan proyek strategis nasional Indonesia–Tiongkok, di mana Jawa Tengah berperan sebagai lokasi implementasi, bukan sebagai pihak yang merancang dan menginisiasi kerangka kerja sama tersebut.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang mengadopsi jenis deskriptif analisis (Safarudin et al., 2023). Secara filosofis dan epistemologis, pendekatan kualitatif bertumpu pada paradigma konstruktivis yang memandang bahwa realitas sosial, termasuk fenomena diplomasi daerah dan kebijakan publik, bukanlah entitas objektif tunggal yang dapat diukur secara kaku melalui kalkulasi angka atau model matematis, melainkan sebuah konstruksi makna yang dibentuk oleh interaksi antaraktor dalam konteks ruang dan waktu tertentu (Nurfajriani et al., 2024).

Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengungkap berbagai motif yang melatarbelakangi suatu kebijakan, serta mendeskripsikan secara komprehensif dan naratif proses perumusan kebijakan mulai dari tingkat diskursus hingga tahap implementasi. Selain itu, pendekatan ini juga memberikan ruang untuk menganalisis relasi kuasa dan kapasitas kelembagaan secara lebih mendalam, yang dalam beberapa konteks belum sepenuhnya dapat dijelaskan melalui pendekatan kuantitatif yang umumnya berfokus pada pengukuran variabel secara terstruktur (Sugiyono, 2023).

Sebagaimana ditekankan dalam literatur metodologi kualitatif, penelitian jenis ini menempatkan peneliti secara langsung sebagai instrumen kunci yang terjun langsung untuk menangkap realitas di lapangan secara holistik (Purnomo, 2024). Peneliti akan bertindak sebagai partisipan yang terlibat penuh dalam proses pengumpulan makna, beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan kondisi objek

penelitian, serta melakukan interaksi intensif dengan subjek untuk memperoleh narasi yang autentik dan komprehensif (Sugiyono, 2023). Melalui pendekatan kualitatif deskriptif ini, abstraksi dari praktik paradiplomasi dapat direkonstruksi menjadi sebuah laporan naratif yang mendalam, memberikan pemahaman baru mengenai fenomena transnasional di tingkat lokal.

Sebagaimana ditekankan dalam literatur metodologi kualitatif, penelitian jenis ini menempatkan peneliti secara langsung sebagai instrumen kunci yang terjun langsung untuk menangkap realitas di lapangan secara holistik (Purnomo, 2024). Peneliti akan bertindak sebagai partisipan yang terlibat penuh dalam proses pengumpulan makna, beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan kondisi objek penelitian, serta melakukan interaksi intensif dengan subjek untuk memperoleh narasi yang autentik dan komprehensif (Sugiyono, 2023). Melalui pendekatan kualitatif deskriptif ini, abstraksi dari praktik paradiplomasi dapat direkonstruksi menjadi sebuah laporan naratif yang mendalam, memberikan pemahaman baru mengenai fenomena transnasional di tingkat lokal.

Dalam konteks penelitian ini, fenomena diplomasi daerah, perumusan kebijakan publik, serta tata kelola pemerintahan bertingkat lintas batas negara tidak dipahami sebagai realitas yang bersifat tunggal dan sepenuhnya objektif, melainkan sebagai proses sosial yang dipengaruhi oleh berbagai aktor, kepentingan, dan konteks yang melingkupinya. Oleh karena itu, fenomena tersebut tidak dapat dijelaskan secara memadai hanya melalui pengukuran kuantitatif atau perhitungan statistik, tetapi memerlukan pemahaman yang lebih mendalam terhadap makna, proses, dan dinamika yang terjadi di baliknya.

1.8.2 Situs Penelitian

Penentuan lokasi penelitian dalam studi kualitatif tidak semata-mata didasarkan pada batasan wilayah administratif, melainkan pada relevansi lokasi terhadap intensitas interaksi dan keberlangsungan fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, lokasi penelitian difokuskan pada ibu kota Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kota Semarang.

Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan metodologis bahwa Kota Semarang merupakan pusat administrasi pemerintahan daerah, termasuk kedudukan Gubernur, Sekretariat Daerah, khususnya Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerja Sama serta berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang memiliki peran dalam perumusan dan pelaksanaan kerja sama dengan Provinsi Fujian. Dengan demikian, Kota Semarang menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji bagaimana kebijakan luar negeri di tingkat nasional diterjemahkan dan diimplementasikan dalam bentuk kebijakan serta program di tingkat daerah.

1.8.3 Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang mengandalkan studi literatur, subjek penelitian direpresentasikan oleh entitas-entitas tekstual yang memuat informasi, keputusan, dan rekam jejak diskursif mengenai fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2023). Subjek dalam penelitian ini secara spesifik terdiri atas dokumen-dokumen kebijakan pemerintah, kerangka regulasi ketatanegaraan dan daerah, arsip perjanjian internasional tingkat subnasional, laporan capaian kinerja instansi, serta

literatur akademik terdahulu yang merekam, membahas, dan menganalisis secara kritis peran strategis yang dimainkan oleh aktor pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Fujian, di ranah paradiplomasi.

Subjek dalam penelitian ini terdiri atas dokumen pemerintahan, serta literatur terdahulu yang relevan dengan kerja sama *Sister Province* antara Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Fujian. Pemilihan subjek penelitian dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai proses paradiplomasi terorkestrasi di tingkat daerah serta dinamika implementasi kerja sama internasional subnasional. Narasumber dalam penelitian ini meliputi pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kerja sama *Sister Province*, khususnya aparatur pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah yang memiliki kewenangan dan pengalaman dalam pengelolaan kerja sama luar negeri daerah, serta pihak lain yang dianggap memiliki pengetahuan dan kompetensi terkait kerja sama antardaerah lintas negara.

Subjek penelitian juga mencakup dokumen pemerintahan dan kebijakan resmi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Dokumen tersebut meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, nota kesepahaman (MoU), perjanjian kerja sama, serta dokumen perencanaan dan laporan resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama *Sister Province* dengan Provinsi Fujian. Dokumen ini digunakan untuk menganalisis kerangka regulasi, tujuan kebijakan, serta bentuk paradiplomasi terorkestrasi luar negeri di tingkat subnasional. Adapun literatur terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas buku akademik, jurnal ilmiah, artikel kebijakan, dan

laporan penelitian yang membahas diplomasi daerah, paradiplomasi, kerja sama *Sister City* maupun *Sister Province*, serta kebijakan luar negeri

Dalam tradisi penelitian kualitatif, subjek penelitian tidak didefinisikan sebagai bagian dari populasi atau sampel representatif yang dikalkulasi secara statistik untuk tujuan generalisasi, melainkan direpresentasikan dengan istilah "informan" (Purnomo, 2024). Informan adalah individu, kelompok, atau entitas otoritas yang diyakini secara empiris memiliki kompetensi, pengalaman langsung, serta penguasaan informasi esensial terkait objek material penelitian, sehingga mereka sanggup memberikan data primer yang kredibel, berbobot, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya (Purnomo, 2024).

Untuk menentukan dan merekrut informan yang kredibel, penelitian ini menerapkan teknik *purposive sampling* (pengambilan sampel bertujuan) yang akan dikombinasikan dengan teknik *snowball sampling* (bola salju) apabila dalam proses pengumpulan data di lapangan diperlukan perluasan jejaring informasi yang belum terpetakan di awal (Himam et al., 2026). Penggunaan teknik *purposive sampling* berarti bahwa peneliti secara sengaja, sadar, dan terencana memilih individu-individu yang dikategorikan sebagai informan kunci berdasarkan serangkaian kriteria inklusi spesifik dan teoretis yang telah ditetapkan sebelum turun ke lapangan (Purnomo, 2024). Informan kunci ini adalah pihak-pihak elite birokrasi dan praktisi yang terlibat sangat aktif sebagai aktor subnasional, konseptor kebijakan, pengambil keputusan strategis, maupun negosiator ulung dalam perumusan kebijakan kerja sama internasional Provinsi Jawa Tengah.

Kriteria informan kunci yang ditetapkan dalam penelitian ini mencakup beberapa lapisan hierarki pemerintahan dan sektoral, antara lain pejabat otoritas eksekutif tingkat tinggi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (terutama pada level pimpinan Sekretariat Daerah atau Kepala Biro yang memiliki yurisdiksi langsung menangani kerja sama luar negeri daerah), aparatur perencana strategis dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang bertugas secara spesifik menyinkronkan draf proyek investasi asing dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta representasi dari pihak fasilitator investasi dan perindustrian seperti pejabat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maupun pihak manajemen pengelola kawasan industri terpadu. Pemilihan subjek yang sangat selektif ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digali benar-benar bersumber dari aktor utama yang memahami secara taktis maupun filosofis dinamika paradiplomasi tersebut.

Sehubungan dengan kriteria tersebut penulis memilih untuk menghubungi dan mewawancarai Kasubbag Kerjasama Luar Negeri (KSLN) Biro PEMOTDAKS (Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerja Sama) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

1.8.4 Jenis Data

Pengklasifikasian jenis dan sumber data kualitatif dalam kerangka penelitian ini dibedakan secara dikotomis menjadi dua kategori fundamental, yaitu data primer dan data sekunder. Keduanya tidak berdiri secara terpisah, melainkan saling melengkapi dan dikonfrontasikan satu sama lain untuk merekonstruksi

pemahaman atas relasi Jawa Tengah dan Fujian secara integratif dan utuh (Purnomo, 2024).

Kategori yang pertama adalah data primer. Data primer merupakan data empiris kualitatif yang diperoleh, digali, dan dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama di lokasi penelitian, tanpa melalui perantara institusi pelapor atau literatur pihak ketiga (Sugiyono, 2023).

Jenis data ini memiliki tingkat keaslian yang tinggi karena merekam secara langsung pandangan, pertimbangan, serta rasionalitas tindakan dari para aktor pembuat kebijakan pada saat interaksi berlangsung. Data tersebut juga memungkinkan peneliti untuk memahami dinamika perspektif dan proses pengambilan keputusan yang terjadi dalam konteks kebijakan secara lebih kontekstual.

Dalam kerangka operasional penelitian ini, data primer akan didapatkan secara esensial dari hasil wawancara tatap muka yang mendalam secara kualitatif dengan para informan kunci yang telah diidentifikasi dan dipilih melalui metode purposif sebelumnya (Sugiyono, 2023). Karakteristik data primer dalam penelitian ini memiliki peran yang penting dalam membantu mengungkap dinamika yang melatarbelakangi proses translasi kebijakan serta interaksi lintas batas yang tidak selalu terdokumentasi secara lengkap dalam dokumen resmi. Oleh karena itu, data primer memberikan kontribusi signifikan dalam melengkapi informasi yang tidak sepenuhnya tercermin dalam sumber-sumber administratif formal.

Data dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder tersebut meliputi undang-undang, peraturan

dan kebijakan pemerintah, dokumen resmi kerja sama, jurnal ilmiah, buku akademik, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas diplomasi daerah, kerja sama Sister Province, dan kebijakan luar negeri Indonesia di tingkat subnasional. Data sekunder ini digunakan sebagai dasar konseptual dan pendukung analisis terhadap penelitian.

Penggunaan data sekunder secara tunggal dinilai sangat relevan dan memiliki derajat reliabilitas yang tinggi karena objek ontologis yang diteliti adalah produk-produk perundang-undangan, struktur arsitektur kebijakan, dan manuver diplomasi institusional. Hal-hal tersebut dapat dipetakan secara presisi melalui representasi tekstual *de jure* maupun rekaman *de facto* capaian program (Purnomo, 2024). Data sekunder ini mencakup keseluruhan informasi komprehensif yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari tangan pertama, melainkan melalui penelusuran yang ekstensif terhadap kepustakaan, arsip institusi publik, publikasi laporan lembaga supranasional, dan jurnal-jurnal ilmiah (Sugiyono, 2023)

1.8.5 Sumber Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan dua jenis sumber data yaitu primer dan sekunder. data Sekunder, yaitu data yang diperoleh diambil secara tidak langsung dari sumbernya, meliputi buku, jurnal ilmiah, dokumen kebijakan pemerintah, Peraturan Gubernur, Undang-undang, hasil penelitian terdahulu, serta artikel dan berita daring yang relevan dengan diskursus praktik kerjasama *sister province* terutama secara spesifik mengenai Jawa Tengah dan Fujian.

Untuk menjamin kedalaman analisis deduktif dan induktif serta memastikan validitas konstruksi argumen yang dibangun, sumber data sekunder yang digunakan

dalam riset *desk research* ini diekstraksi secara masif dan diklasifikasikan ke dalam beberapa klaster utama. Pengklasifikasian sumber data ini dirancang sedemikian rupa guna menjawab kebutuhan setiap indikator pada kerangka teoretis penelitian, yakni *Orchestrated Paradiplomacy*, Dinamika Aktor Subnasional (*Sub-National Actors*), dan Tata Kelola Multilevel (*Multi-Level Governance*). Pemetaan sumber data sekunder tersebut diuraikan secara komprehensif sebagai berikut:

Klaster Data Sekunder	Deskripsi Spesifik Sumber Dokumen	Fungsi Analitis dalam Kerangka Teori Penelitian
Regulasi & Hukum Nasional	UU No.37/1999, UU No.24/2000, UU No.23/2014, Permendagri No.25/2020.	Membedah dimensi <i>Multi-Level Governance</i> dan pembatasan konstitusional paradiplomasi daerah.
Kebijakan & Perencanaan Daerah	RPJMN, RPJMD Jateng, Pergub Jateng (No.21/2024, No.19/2025, No.51B/2023, No.13/2025, No.26/2025).	Menganalisis <i>Policy Adaptation</i> melalui restrukturisasi perizinan, tata ruang spasial, dan alokasi anggaran.
Naskah Perjanjian	MoU Sister Province, PKS sektoral Dinas Kelautan	Melihat manifestasi teknis dan agensi spesifik <i>Sub-</i>

Internasional	dan Perikanan (DKP), Masterplan KEK Batang (TCTP).	<i>National Actors</i> dalam mengeksekusi proyek geoekonomi.
Kepustakaan Akademik	Jurnal terindeks Hubungan Internasional, buku teori paradiplomasi, riset historiografi pesisir Jawa.	Memberikan validasi teoretis, mengukur modal sosio-kultural (sejarah imigrasi), dan mendukung metodologi <i>desk research</i> .
Arsip Media & Siaran Pers	Portal <i>jatengprov.go.id</i> , <i>fujian.gov.cn</i> , Antara News, Xinhua News, laporan <i>think-tank</i> ekonomi.	Melacak kronologi sejarah interaksi empiris, realisasi nilai Penanaman Modal Asing (PMA), dan pembentukan sentimen pasar.

Tabel.1. 1 Pemetaan Klaster Sumber Data Sekunder dalam *Desk Research*

Sedangkan sumber data yang lainnya adalah hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan informan kunci yang merupakan Kasubbag Kerjasam Luar Negeri (KSLN) Biro PEMOTDAKS (Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerja Sama) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, melakukan pengumpulan data primer dan sekunder. Dalam rangka memastikan kedalaman analisis dan kelengkapan informasi kualitatif, proses pengumpulan data dalam penelitian ini tidak dilakukan dengan menggunakan satu metode Tunggal (Anggraini, 2025). Oleh karena itu, penelitian ini menerapkan strategi penggabungan berbagai metode secara sistematis. Instrumen pengumpulan data yang digunakan terdiri atas tiga pendekatan utama yang saling melengkapi dalam memperoleh data yang relevan dan komprehensif.

Pendekatan pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dengan pedoman semiterstruktur (Sugiyono, 2023). Melalui teknik ini, peneliti menyusun kerangka pertanyaan yang berfokus pada aspek tata kelola birokrasi, proses pelaksanaan dan penyalarsan kepentingan daerah, serta evaluasi pelaksanaan kerja sama. Meskipun memiliki panduan dasar, metode ini tetap memberikan ruang fleksibilitas bagi peneliti untuk mengembangkan pertanyaan lanjutan sesuai dengan dinamika wawancara, sehingga memungkinkan eksplorasi informasi yang lebih mendalam berdasarkan respons informan.

Penggunaan wawancara mendalam semiterstruktur bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif (Sugiyono, 2023) mengenai proses administratif, dinamika koordinasi, serta berbagai tantangan yang dihadapi oleh aktor birokrasi daerah dalam pelaksanaan kerja sama internasional. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali bagaimana proses pengambilan keputusan dan penyesuaian kebijakan dilakukan dalam konteks interaksi antara pemerintah

daerah, pemerintah pusat, dan mitra internasional.

Pilar pengumpulan data yang kedua adalah studi dokumentasi yang teliti dan ekstensif (Purnomo, 2024). Pada tahap ini, peneliti melakukan ekstraksi data melalui penelaahan sistematis terhadap berbagai dokumen tekstual, lembaran arsip daerah, dan catatan historis kebijakan. Dalam studi tata kelola publik, metode dokumentasi tidak boleh diposisikan sekadar sebagai elemen pelengkap yang formalitas belaka, melainkan sebagai instrumen esensial untuk melacak tingkat koherensi dan sinkronisasi antara narasi verbal yang disampaikan oleh pejabat dalam sesi wawancara dengan bukti realisasi hukum, penyediaan anggaran, dan kerangka legal yang tercetak hitam di atas putih.

Pendekatan pengumpulan data yang ketiga dalam penelitian ini adalah observasi non-partisipan yang berfungsi sebagai pendukung dalam memperkuat narasi empiris (Purnomo, 2024). Metode ini dilakukan melalui pengamatan terhadap berbagai aktivitas yang berkaitan dengan implementasi kerja sama, baik secara langsung maupun melalui penelusuran dokumentasi visual. Observasi ini mencakup, antara lain, perkembangan infrastruktur di kawasan industri terpadu serta bentuk-bentuk interaksi kultural yang mencerminkan praktik kerja sama bilateral.

Pelaksanaan metode observasi ini mengikuti tahapan penelitian lapangan dalam ilmu sosial yang dilakukan secara sistematis. Tahapan tersebut meliputi fase pra-lapangan berupa penyusunan desain penelitian dan pengurusan perizinan, dilanjutkan dengan tahap pengumpulan data di lapangan melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian tahap analisis data yang dilakukan secara intensif, hingga

tahap akhir berupa penyusunan laporan penelitian secara keseluruhan (Himam et al., 2026).

Sedangkan pengumpulan data sekunder melalui dokumentasi terhadap dokumen resmi seperti laporan PERGUB, Undang-Undang, serta hukum - hukum yang berpengaruh pada proses kerjasama *sister province* ini serta artikel ilmiah dan sumber berita terpercaya. Seluruh proses dilakukan melalui metode desk research dan wawancara tatap muka yang berlokasi di Semarang.

Sebagaimana karakteristik penelitian *desk research*, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi dan telaah pustaka (*literature review*) secara sistematis. Data yang digunakan sepenuhnya berasal dari sumber sekunder berupa dokumen hukum, publikasi akademik, laporan resmi, data statistik, serta berbagai sumber tertulis yang relevan dengan fokus penelitian (Purnomo, 2024).

Proses pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahapan utama. Tahap pertama adalah identifikasi (*identification*), yaitu penentuan kata kunci dan strategi pencarian pada berbagai basis data akademik dan sumber digital (Purnomo, 2024). Kata kunci yang digunakan antara lain *paradiplomacy*, *Sister Province* Jawa Tengah dan Fujian, *Two Countries Twin Parks* (TCTP), *policy adaptation*, desentralisasi kebijakan luar negeri, serta investasi asing di Kawasan Ekonomi Khusus Batang.

Tahap kedua adalah penapisan (*screening*), yaitu proses seleksi sumber berdasarkan tingkat relevansi, kredibilitas, dan kesesuaian periode penelitian. Pada tahap ini, dokumen yang dikaji difokuskan pada periode pasca-reformasi dan

pelaksanaan otonomi daerah hingga perkembangan terkini kerja sama Jawa Tengah dan Fujian.

Tahap ketiga adalah ekstraksi (*extraction*), yakni proses pengumpulan dan pengorganisasian informasi yang relevan dari berbagai sumber. Peneliti menelaah ketentuan dalam regulasi, dokumen perencanaan pembangunan, laporan investasi, serta data statistik yang berkaitan dengan implementasi kerja sama Sister Province antara Jawa Tengah dan Fujian.

1.8.7 Teknik Analisis dan Interpretasi Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tematik kualitatif. Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi dianalisis dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan konsep aktor subnasional, dan tata kelola multilevel, diplomasi ekonomi. Peneliti menafsirkan data secara mendalam untuk menjawab rumusan masalah mengenai proses paradiplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui kerja sama *Sister Province* dengan Provinsi Fujian. Interpretasi data dilakukan dengan mencocokkan temuan empiris dengan kerangka teori yang digunakan, serta membandingkan antara praktik aktual dan norma atau kebijakan regional yang berlaku.

Data kualitatif yang diperoleh dari lapangan, baik berupa transkrip wawancara, catatan lapangan, maupun dokumen kebijakan, memerlukan proses pengolahan yang sistematis agar dapat diinterpretasikan menjadi temuan penelitian yang bermakna. Proses tersebut meliputi tahapan reduksi data, pengelompokan, serta kategorisasi berdasarkan tema-tema yang relevan dengan fokus penelitian

(Prof. Dr. Sugiyono, 2013).

Untuk mencapai hal tersebut, penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif tematik yang dilakukan secara berulang dan interaktif sejak tahap awal pengumpulan data hingga diperoleh pemahaman yang memadai terhadap fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2023). Proses analisis ini berlangsung secara berkelanjutan hingga mencapai tingkat kejenuhan data, yaitu ketika informasi yang diperoleh menunjukkan pola yang konsisten dan tidak lagi menghasilkan temuan baru yang signifikan.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Tahap reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan mengelompokkan informasi yang relevan dengan fokus penelitian, khususnya terkait proses dalam praktik paradiplomasi. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi yang sistematis dan koheren untuk memudahkan proses interpretasi.

Proses penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif bersifat dinamis dan berlangsung secara berulang. Temuan awal yang diperoleh selama proses penelitian dapat mengalami penyesuaian seiring dengan ditemukannya data tambahan yang memberikan penguatan maupun perspektif baru terhadap fenomena yang diteliti. Dengan demikian, analisis dilakukan secara berkelanjutan hingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

Melalui proses tersebut, hasil penelitian diharapkan tidak hanya merefleksikan kerangka teoretis yang digunakan, tetapi juga menghasilkan temuan empiris yang mampu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dinamika

proses pengambilan keputusan dalam praktik diplomasi di tingkat subnasional.

1.8.8 Kualitas Data (*Goodness Criteria*)

Dalam penelitian kualitatif, kualitas data menjadi aspek yang penting untuk memastikan bahwa temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan kriteria kualitas data (*goodness criteria*) yang meliputi kredibilitas (*credibility*), transferabilitas (*transferability*), dependabilitas (*dependability*), dan konfirmabilitas (*confirmability*). Keempat kriteria tersebut digunakan untuk menjamin bahwa data yang diperoleh memiliki tingkat keabsahan dan reliabilitas yang memadai (Purnomo, 2024).

Kredibilitas (*credibility*) berkaitan dengan tingkat kepercayaan terhadap hasil penelitian. Dalam penelitian ini, kredibilitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengonfirmasi data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti dokumen kebijakan pemerintah, laporan resmi, serta literatur akademik yang relevan. Selain itu, peneliti juga melakukan pembacaan secara mendalam (*in-depth reading*) terhadap dokumen untuk memastikan konsistensi informasi yang diperoleh.

Transferabilitas (*transferability*) merujuk pada sejauh mana temuan penelitian dapat diterapkan pada konteks lain yang memiliki karakteristik serupa. Dalam penelitian ini, transferabilitas dicapai dengan memberikan deskripsi yang rinci (*thick description*) mengenai konteks penelitian, khususnya terkait kerja sama Sister Province antara Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Fujian, sehingga memungkinkan pembaca untuk memahami relevansi temuan dalam konteks yang lebih luas.

Dependabilitas (*dependability*) berkaitan dengan konsistensi proses penelitian. Untuk menjaga dependabilitas, penelitian ini dilakukan secara sistematis dengan mengikuti tahapan penelitian kualitatif yang jelas, mulai dari pengumpulan data, analisis, hingga penarikan kesimpulan. Selain itu, peneliti juga mendokumentasikan seluruh proses penelitian secara transparan agar dapat ditelusuri kembali.

Konfirmabilitas (*confirmability*) merujuk pada objektivitas data dan hasil penelitian. Dalam penelitian ini, konfirmabilitas dijaga dengan memastikan bahwa temuan yang dihasilkan benar-benar didasarkan pada data yang diperoleh, bukan pada asumsi atau bias peneliti. Hal ini dilakukan melalui penggunaan data yang bersumber dari dokumen resmi dan referensi akademik, serta dengan menyajikan rujukan yang relevan untuk mendukung setiap argumen yang dibangun.

Dengan menerapkan keempat kriteria tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan data yang valid, reliabel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.